

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A.Zuhdi Muhdlor, 1995, (*Memahami Hukum Perkawinan:Nikah,Talak,Cerai dan Rujuk*),Bandung ,Cet,ke-II : Al-Bayan, hlm.43.
- Abdul Hiyadh,1993,( *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III* ), Surabaya, Al-Hidayah, hlm. 426.
- AbdulManan,2007,(*Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan*), Jakarta,Kencana,Perdana Grub, hlm. 31.
- Abdul Shomad, 2010, (*Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*). Jakarta, Kencana, hlm.258-289.
- Ahmad Wasron Munawwir,al-Munawwir, 1997, (*Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*), Surabaya, Pustaka Progresif, hlm 216.
- Ibnu Qudamah, 1984, (*al-Mughni Juz 5*), Beirut, Cet; I : Dar al-Fikr, hlm.3.
- ImanSuprayoga dan Tabroni, 2001, (*Metode Penelitian Dan Sosoal-Agama*), Bandung,Remaja Rosdakarya, hlm 167.
- Mahmud Yunus, 1983, ( *Hukum perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'I, hanafi ,Maliki ,Hambali*), Jakarta,Cet,ke-1:Hida karya Agung, hlm.112.
- Muhammad Yahya Harapan, 2001, (*kedudukan kewenang dan acara peradilan agama`UU no.7 tahun 1989*) ,Jakarta,Sinar Grafika,hlm 117.
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, ( *Dua lisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*), Yogyakarta, hlm.181.

- Mukti H. Arto, 1996, (*Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*), kota, Pustaka Pelajar, hlm.43.
- Ronal S. Kraybill, 2006, (*Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans, Peace Skill, Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*), Yogyakarta, Kanisius, hlm.63.
- Sayyid Sabiq, 1990, (*Fiqh al-Sunnah Juz 2*), Kairo, Dar al-Fath, hlm. 201.
- Syahrizal Abbas, 2009, (*Mediasi: Dalam Perspektif Hukum Syariah, hukum Adat, dan Hukum Nasional*), Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm. 1-2.
- Syahrizal Abbas, 2009, (*Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*), Jakarta, Kencana, hlm.25-26.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), Jakarta, Balai Pustaka, hlm.640.
- Tim Redaksi, 2008, (*Kamus besar bahasa Indonesian pusatbahasa*), Jakarta, Edisi ke IV : PT Gramedia Pustaka Utama, hlm,216.
- V. Harlen Sinaga, 2015, (*Hukum Acara Perdata dengan pemahaman hukum materiil*), Jakarta, Erlangga, hlm.118.
- Victor M. Situmorang, 1993, (*Perdamaian Perwasiatan Dalam hukum Acara Perdata*), Jakarta, Cet.1, PT. Rineka Cipta, hlm 22.

## JURNAL

Arum Kusumanigrum,yunanto,benny Ryanto,“EveltifiatasMediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negri Semarang ”, *Diponegoro Law Jurnal*, Vol. 6 No. 1, (2017).

Awaluddin.“Hakim Yang Ideal menurut Kaca Mata Islam”*Jurnal Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Vol.2 No.1, (2017).

Fitri Purnama,Dkk. “Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan”,*Jurnal Unifikasi*, Vol.04 No.02,(2017).

Jamaluddin.T. “Implikasi Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap Capaian Asas Fleksibilitas”,*JurnalEkspose*, Vol.XXVI No.1,(2017).

Masruhartono danapriyani. “Evektifitas Peran Hakim Mediator Dalam Mencegah Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Jambi”,*Journal of Islamic Guldance and Counselling*, Vol.1 No.1 (2017).

Muhammad Ali . “Hakim Dalam Prefektif Hadis”,*Jurnal Kajian Ilmu Hadis*, Vol.8 No.1, (2017).

Muhammad Amin Sayyad . “Urgensi Pencatatan Nikah Sebagai rukun Nikah ( Studi Kritis Pemikiran Siti Musdah Mulia Dan Khoiruddun Nasution)”,*El-Maslahah Journal*, Vo.8 No.1,(2018).

Muhammad Khaeruddin Hamsin. “Gap Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan”,*Jurnal Media Hukum*, Vol 20 No.1, (2013).

Muhammad Taufiq,Sarsiti, Rindha Widyaningsid dan Rani Hendriyani.“Mediasi Sebagai Penguatan Kearifan Lokal Banyumas dalam Penyelesaian Perkara Pidana ”,*Jurnal Media Hukum*, Vol.24 No.3, (2017)

Stevana ameliyana Khusen, “Hakekat mengenai Keberadaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri” *Lex Crimen jurnal*, Vol. V No. 6,(2016).

Website Pengadilan Agama Sleman (online) , Dan dapat di akses di <http://paslemankab.go.id/>.

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama.